



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 20 Januari 2025

Halaman: 4

**TAJUK**

### Graduasi Penerima Manfaat PKH Harus Terus Ditingkatkan

Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jogja pada 2024 berkurang 501 keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan mengakhiri kepesertaan secara alami maupun mandiri itu, ratusan keluarga di Kota Jogja menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Graduasi alami terjadi ketika KPM tidak lagi memenuhi kriteria dari tujuh indikator penilaian, seperti adanya ibu hamil, anak balita, anak sekolah jenjang SD sampai SMA, warga lansia, atau anggota keluarga yang memiliki disabilitas. Sedangkan graduasi mandiri, dilakukan dengan mendorong keluarga peserta PKH mengakhiri kepesertaan dengan kesadaran sendiri, karena kondisi sosial ekonomi mulai membaik sehingga tidak lagi menggantungkan bantuan dari pemerintah.

Jumlah PKH di Kota Jogja menunjukkan angka yang terus menurun. Pada 2023, total peserta PKH ada 12.489 KPM, dan 2024 turun menjadi 11.988 KPM.

Sebelumnya pada 2021 jumlah KPM PKH di Kota Jogja sebanyak 10.956, dan melonjak jadi 13.466 per 2022. Terjadi peningkatan peserta dari 2021 ke 2022 karena saat itu masuk dalam pandemi Covid-19. Pemerintah Pusat pun juga sudah mencanangkan jumlah penerima manfaat terus turun. Bahkan saat berkunjung ke Bantul, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta para pendamping PKH di Kabupaten Bantul untuk melakukan graduasi minimal pada 10 kelompok KPM per tahun untuk mengentaskan kemiskinan.

Penurunan jumlah KPM di Kota Jogja itu juga senyampang dengan kian menurunnya jumlah keluarga miskin di DIY. Jumlah penduduk miskin di DIY pada September 2024 mencapai 430.470 orang, atau persentase penduduk miskinnya adalah sebesar 10,40%. Angka ini turun 0,43 poin persen dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 10,83%. Meski persentase kemiskinan terus turun, tetapi angka itu masih berada di atas rata-rata nasional.

Penurunan jumlah KPM ini tentunya harus terus dipertahankan. Pemerintah daerah dengan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang digulirkan harus berusaha untuk menurunkan jumlah KPM. Selain itu, warga yang sudah mentas, harus secara sadar juga mengundurkan diri sebagai peserta KPM.

Agar kondisi ekonomi membaik, pemerintah daerah di DIY perlu membuat perencanaan peningkatan perekonomian warga. Apalagi sebentar lagi lima kabupaten/kota di DIY akan memiliki kepala daerah. Harapannya, mereka memiliki program yang jitu untuk mengentaskan kemiskinan warga.

Program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat saja. Pemkab/Pemkot bersama dengan Pemda DIY memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyejahterakan warganya.

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 05 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005